



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
2.1 Latar Belakang	1
2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	1
2.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama.....	2
2.4 Landasan Hukum	3
2.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Perencanaan Kinerja.....	8
2.3 Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	18
3.3 Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV	30
PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Rekomendasi	30
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	7
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	8
Tabel 2. 3 Tujuan Perangkat Daerah, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	9
Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	9
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	15
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	18
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 -2021	18
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	19
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra	20
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Nasional	20
Tabel 3. 7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	21
Tabel 3. 8 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja	23
Tabel 3. 9 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	244
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	266

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang 5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

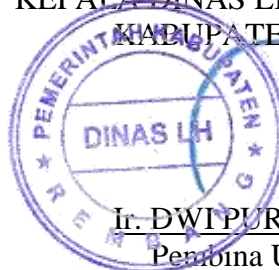
Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG



Ir. DWI PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 199103 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi.

2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Adapun Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Sekretariat :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perencanaan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b. Sub Koordinator Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan:
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
 - b. Sub Koordinator Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - c. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - c. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan
5. UPTD Pengelolaan Sampah
 - a. Subbagian Tata Usaha

2.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagai upaya menanggapi berbagai persoalan dan

masalah kualitas lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Rembang. yang diprioritaskan untuk mendukung tujuan daerah yaitu Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yaitu :

1. Masih terjadinya pencemaran lingkungan baik pencemaran air dan udara.
2. Belum optimalnya tutupan lahan.
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah

2.4 Landasan Hukum

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

2.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang Latar Belakang, struktur organisasi dan tata kerja aspek strategis organisasi dan permasalahan utama, landasan hukum serta sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

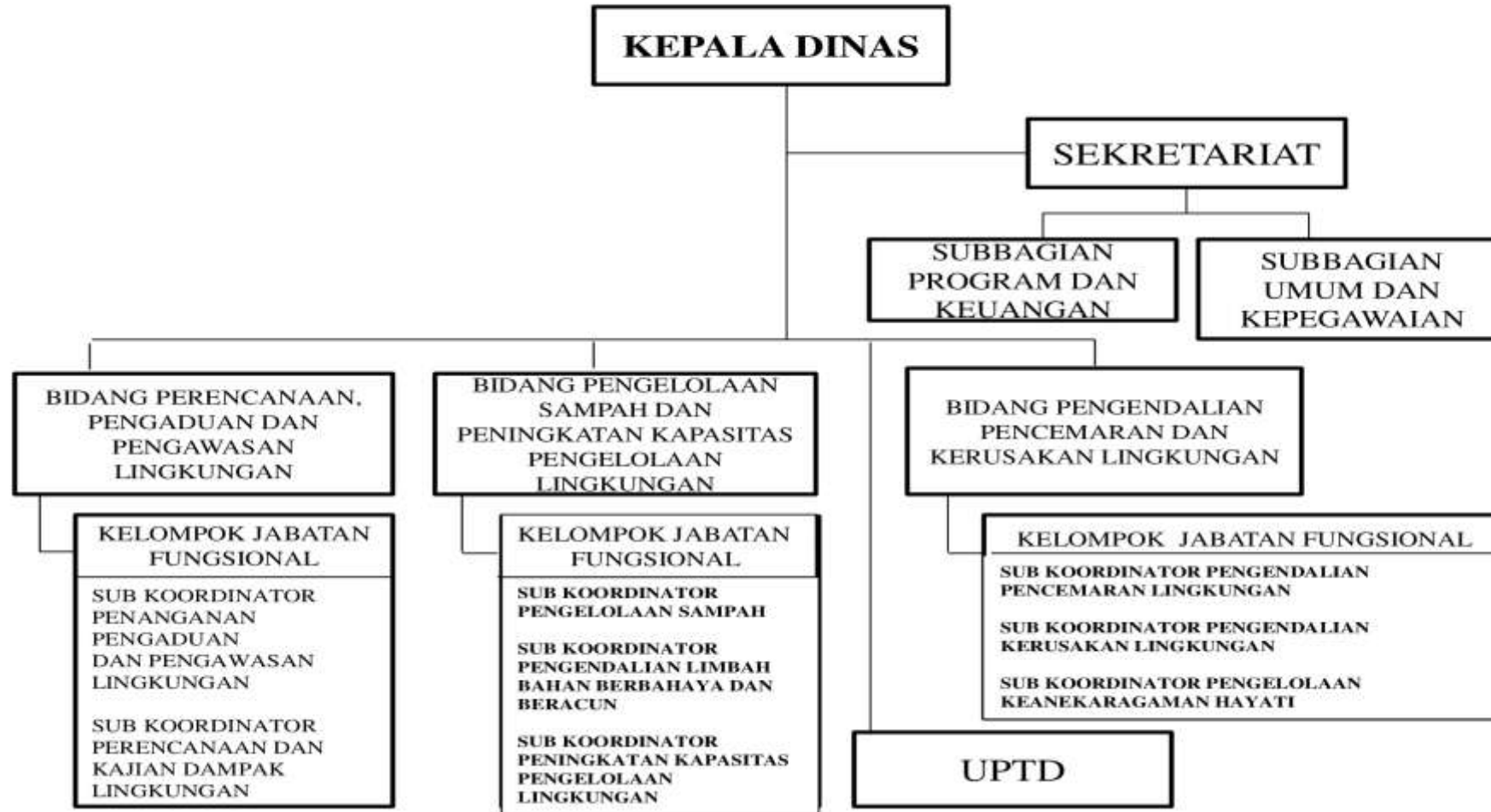
Bab ini menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi , Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki satu visi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021 – 2026. Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut : “*Rembang Gemilang 2026*”, GEMILANG dapat dimaknai sebagai *GEMati*, *gampIL* dan *gambLANG*: *Gemati* adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya. *Gampil* adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat. *Gamblang* adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Untuk mencapai visi tersebut akan diwujudkan melalui empat misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Misi 2 : Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.

Misi 3 : Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Misi 4 : Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

Berdasarkan penjabaran atas visi misi Kabupaten Rembang tersebut maka kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah bertanggungjawab untuk mewujudkan visi Rembang Gemilang 2026, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian misi daerah

Misi 3 : “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”.

Tujuan : Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah, dengan indikator kinerja utama daerah yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator kinerja sasaran daerah yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang harus dilaksanakan, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan yang harus dicapai oleh OPD yaitu :

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

b. Indikator Tujuan

Indikator tujuan OPD Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

c. Sasaran

Sasaran OPD untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- Indeks Kualitas Air dan Udara
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah

d. Indikator Sasaran

Terdapat empat indikator sasaran untuk mencapai tiga sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

- Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)
- Presentase peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)
- Presentase peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- Indeks Pengelolaan Sampah.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10
1	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas Air dan Udara	IKA (Indeks Kualitas Air)	52	53	54	55	56
			IKU (Indeks Kualitas Udara)	90	90	90	90	90
		Meningkatnya luas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,64	59,82	60	60,18	60,35

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks pengelolaan sampah	44,8	45	45	46	46

2.2 Perencanaan Kinerja

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Komponen Rencana Kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator kegiatan. Sasaran OPD untuk mewujudkan Tujuan yang ditetapkan Daerah dan program untuk mewujudkan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kegiatan adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Tabel 2. 2. Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meingkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Prosentase kenaikan Indeks Kualitas Air (IKA)	%	1,92
			Prosentase kenaikan Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	0
		Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan	Porsentase kenaikan luas tutupan lahan	%	0,5
		Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks pengelolaan sampah	Angka	44,8

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang disusun merupakan tekad dan janji yang akan dicapai dan disepakati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagai pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan Bupati Rembang sebagai pihak yang memberikan amanah/ tugas dan tanggungjawab kinerja. Melalui perjanjian kinerja inilah kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang menjadi terukur sesuai tugas, fungsi dan wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2. 3. Tujuan Perangkat Daerah, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,06
	-Meningkatnya indeks kualitas Air dan Udara	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU)	52 90
	-Meningkatnya Luas tutupan Lahan	- Indeks Kualitas tutupan lahan	59,64

Untuk mendukung ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup terdapat program dan kegiatan yang mendukung, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4. Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	% Ketercapaian target IKLH	100	81.500.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang tersusun	3	81.500.000
	- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	3	50.500.000
	- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	5	31.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan	60	240.000.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	2	40.000.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Kabupaten/Kota			
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	40.000.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Kerusakan Lingkungan yang Tertangani	4	200.000.000
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	200.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Baru/ Terfasilitasi	1	3.294.500.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	- Jumlah Lokasi RTH baru yang terfasilitasi	4	3.294.500.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3.279.500.000
	- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	- Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	15.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	% perusahaan yg memiliki TPS limbah B3	26	16.000.000
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	- Jumlah perusahaan yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	6	16.000.000
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5	16.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Persentase izin lingkungan yg terfasilitasi	100	38.500.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota	30	38.500.000
	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	38.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	60	50.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	530	50.000.000
	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	93	10.000.000
	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	10.000.000
	- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	480	30.000.000
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	% Penghargaan LH utk sekolah	2,87	25.000.000
		% Penghargaan LH utk kelurahan	43	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan LH tingkat Kabupaten	2	25.000.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	37	25.000.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan	80	10.000.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah aduan yang tertangani	6	10.000.000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	6	1.400.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	3	8.600.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	32	3.328.349.000
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	92.025,69	3.328.349.000
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	197.920.500
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	67857.33	1.469.349.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4	50.000.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>	128	1.611.079.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/ badan hukum/ pimpinan kolektif secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. Laporan Kinerja instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja Sasaran, program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan skala nilai Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---------------|---|--------------|
| a. | Sangat baik | : | >100% |
| b. | Baik | : | >85 – 100% |
| c. | Cukup | : | 65 – 84,99 % |
| d. | Kurang | : | 50 – 64,99 % |
| e. | Sangat Kurang | : | < 50 % |

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Angka	65,28	65,93	102,74	10.050.371.000,-	9.772.639.837,-	97
			Nilai IKM	Indeks	76	78,08	101,00			
		- Perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indikator kinerja yg selaras dgn dokumen perencanaan	Dok	8	10	120	75.300.000,-	64.139.200,-	85
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	90	90	100	7.898.230.000,-	7.726.570.614,-	98
		- Administrasi Umum Perangkat daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum	%	90	90	100	106.150.000,-	105.075.342,-	99
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa penunjang yang terlaksanakan	%	80	80	100	1.881.691.000,-	1.973.089.579,-	95
		- Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	80	80	100	91.000.000,-	83.765.102,-	92
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketercapaian target IKLH	%	100	100	100	81.500.000,-	80.283.200,-	99
		- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang tersusun	dok	3	2	66,67	81.500.000,-	80.283.200,-	99
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan	%	60	95,83	159,72	240.000.000,-	238.192.604,-	99
		- Pencegahan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	dok	2	2	100	40.000.000,-	39.674.050,-	99
		- Pemulihan, Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Lokasi Kerusakan yang tertangani	lok	4	4	100	200.000.000,-	198.518.554,-	99
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Baru/	%	1	0,29	29	3.294.500.000,-	3.229.312.149,-	96

No	Sasaran Strategis	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
		(KEHATI)	Terfasilitasi							
		- Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kab/Kota	Jumlah Lokasi RTH baru yang terfasilitasi	lokasi	4	3	75	3.294.500.000,-	3.229.312.149,-	95,92
		Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Presentase perusahaan yang memiliki TPS Limbah B3	%	26	26	100	16.000.000,-	15.855.000,-	99
		- Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang memiliki TPS Limbah B3	usaha	6	21	350	16.000.000,-	15.855.000,-	99
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan yg terfasilitasi	%	100	100	100	38.500.000,-	37.441.500,-	97
		- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH nya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang taat ijin lingkungan hidup	perusahaan	30	117	390	38.500.000,-	37.441.500,-	97
		Program Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	60	100	166,67	50.000.000,-	50.000.000,-	100
		- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluh lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH (org)	org	530	480	90,57	50.000.000,-	50.000.000,-	100
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan	%	80	100	125	10.000.000,-	9.441.644,-	94
		- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	aduan	6	3	50	10.000.000,-	9.441.644,-	94

No	Sasaran Strategis	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
		Lingkungan Hidup								
		Program Pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	%	32	31,22	97,56	3.328.349.000,-	3.244.674.901,-	97
		- Pengelolaan persampahan	Jumlah sampah yang terkelola	ton	92.025,69	92.026	100	3.328.349.000,-	3.244.674.901,-	97

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,06	65,90	95,42	sedang	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas LH Kab Rembang
		Indeks Kualitas Air (IKA)	52	52,5	100,09	sedang	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90	89,23	99,14	baik	
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan	Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL)	59,64	45,78	76,76	kurang	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 -2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup - Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Pencemaran lingkungan	26,85	53,778	129,729	43,26	55,12	127,41	44,99	54,00	120
		Indeks Kualitas Air (IKA)	51	43,85	85,98	56,03	50	89,23	60	48,75	81,25
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	55	93,05	168,18	88	89,16	169,18	90,05	89,16	99,01
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan	Indeks kualitas Tutupan Lahan	69	58,43	95,79	74,63	59,29	79,44	77,62	60,42	77,84

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	- Meningkatnya luas tutupan lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)				36,72 8,337	41,45 9	112,18	36,80 0	41,45 9	112,6 6

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase peningkatan IKA (Indeks Kualitas Air)	1,92	7,69	400,52
		Prosentase peningkatan IKU (indeks Kualitas udara)	0	0,08	0
	Meningkatnya luas tutupan lahan	Prosentase kenaikan luas tutupan lahan	0,5	-35,5	-7100,00
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan sampah	44,8	15,71	35,07

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rembang;

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,90	70,72	93,18
		Indeks Kualitas Air (IKA)	52,5	56	93,75
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,23	90	99,14
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	45,78	60,35	75,85

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian nasional

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Nasional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Capaian Nasional	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,90	72,42	90,99
		Indeks Kualitas Air (IKA)	52,5	52,82	99,39
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,23	88,06	101,32
		Indeks kualitas tutupan lahan	45,78	60,72	75,39
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	15,71	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3. 7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase kenaikan Indeks Kualitas Air (IKA)	1,92	7,69	400,52	Faktor pendukung keberhasilan - Komitmen dinas LH dalam menjalankan program/kegiatan untuk mencapai sasaran - Melibatkan secara langsung dengan komponen masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan - Melakukan Kerjasama yang baik dengan instansi Pemda dengan Instansi Pemerintah yang lain - Melibatkan komponen organisasi masyarakat yang ada Faktor penghambat/kegagalan - Mundurnya jadwal waktu pelaksanaan kegiatan dinas LH terutama untuk pengadaan barang/jasa - Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara kelestarian lingkungan hidup - Keterbatasan personil teknis lingkungan maupun non teknis serta sarana dan prasarana	- Berusaha melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan - Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, maupun perluasan tutupan lahan - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas program melalui pemilahan kegiatan yang langsung menasar pada pencapaian target dan penyelesaian berbagai masalah di bidang Lingkungan Hidup
		Prosentase kenaikan indeks Kualitas udara	0	0,08	0		
		Presentase kenaikan luas tutupan lahan	0,5	-35,5	-7100		
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	44,8	15,71	35,07		

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Untuk memudahkan interpretasi efektifitas atas pencapaian kinerja tujuan dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

Sedangkan untuk memudahkan interpretasi efisiensi atas pencapaian kinerja tujuan dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien

Berikut dibawah ini merupakan perhitungan efektifitas dan efisiensi tujuan OPD :

I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

- a. Efektifitas

$$Efektivitas = \left(\frac{Capaian\ Kinerja}{Target\ Kinerja} \right) \times 100\%$$

$$Efektivitas = \left(\frac{65,90}{69,06} \right) \times 100\%$$

$$Efektivitas = 95,42 \%$$

- b. Efisiensi

$$Efisiensi = 100\% - \left(\frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya} \times 100\% \right)$$

$$Efisiensi = 100\% - \left(\frac{3.700.888.849,}{4.145.349.000} \times 100\% \right)$$

$$Efisiensi = 100\% - 89,27\%$$

$$Efisiensi = 10,73\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja tujuan sebesar 95,42 % termasuk kategori **amat baik**, sedangkan tingkat efisiensi sebesar 10,73 %, termasuk kategori **sangat efisien**.

II. Indeks Pengelolaan Sampah (IPS)

- a. Efektifitas

$$Efektivitas = \left(\frac{Capaian\ Kinerja}{Target\ Kinerja} \right) \times 100\%$$

$$Efektivitas = \left(\frac{15,71}{44,8} \right) \times 100\%$$

$$Efektivitas = 35,06 \%$$

- b. Efisiensi

$$Efisiensi = 100\% - \left(\frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya} \times 100\% \right)$$

$$Efisiensi = 100\% - \left(\frac{3.244.674.901}{3.774.349.000} \times 100\% \right)$$

$$Efisiensi = 100\% - 85,97\%$$

Efisiensi = 14,03 %

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja tujuan sebesar 35,06 % termasuk kategori kurang, sedangkan tingkat efisiensi sebesar 14,03 %, termasuk kategori *sangat efisien*.

Tabel 3. 8 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,06	65,90	95,42	4.145.349.000	3.700.888.849	89,27	10,73
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan - Indeks Pengelolaan Sampah	44,8	15,71	35,07	3.415.500.000	3.160.212.149	85,97	14,03

Tabel 3. 9 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup - Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	95,42	Perencanaan Lingkungan Hidup	% Ketercapaian target IKLH	100	Menunjang
		Indeks Kualitas Air (IKA)	100,96	- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang tersusun	66,67	Menunjang
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	99,14	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Hasil pemantauan Tidak melebihi cemar ringan	159,72	Menunjang
				- Pencegahan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Pemantauan Lingkungan	100	Menunjang
				- Pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kerusakan lingkungan yang tertangani	100	Menunjang
		Indeks Pengelolaan sampah (IPS)	35,07	Program Pengelolaan persampahan	% Penanganan Sampah	97,56	Menunjang
				- Pengelolaan persampahan	- Jumlah sampah yang terkelola	100	Menunjang
				Program pengendalian Bahan B3 dan Limbah B3	Presentase perusahaan yang memiliki TPS Limbah B3	100	Menunjang
				- Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang memiliki TPS Limbah B3	350	Menunjang
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan	125	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah aduan yang tertangani	50	Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Prosentase penghargaan Lingkungan Hidup untuk Sekolah	211,85	Menunjang
				- Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten	800	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase ijin lingkungan yang terfasilitasi	100	Menunjang
				- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH nya diterbitkan oleh Pemda Kab/kota	Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah kab/kota	390	Menunjang
				Program Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	166,67	Menunjang
				Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluh lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH (org)	90,57	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan	Indeks Kualitas tutupan lahan	76,76	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	Prosentase luas RTH baru/terfasilitasi	29,00	Menunjang
				- Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/Kota	- Jumlah lokasi RTH baru yang terfasilitasi	75	Menunjang

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi dan anggaran pada suatu organisasi perangkat daerah (OPD) akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas Lingkungan Hidup ditunjang oleh sektor keuangan/anggaran yang cukup.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2022 dari anggaran yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebesar **Rp. 18.110.418.200,-** , kemudian ada perubahan anggaran sebesar **Rp. 976.198.200,-** sehingga anggaran berkurang menjadi **Rp. 17.134.220.000,-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 16.772.137,835,-** atau **97,88 %**.

Adapun rincian belanja sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan	Capaian Fisik
				%	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.050.371.000	9.772.639.837	97%	97%
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.800.000	64.139.200	86,90%	85%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	5.499.900	84,61%	85%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.800.000	23.669.600	82,18%	82%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	34.969.700	87,42%	87%
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.896.230.000	7.726.570.614	97,85%	98%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.649.730.000	7.486.810.914	97,87%	98%
	- Gaji		5.689.165.559		
	-Tunjangan ASN		1.797.645.355		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	237.500.000	230.780.000	97,17%	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.000.000	8.979.700	99,77%	100%
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0%	0%
1	Pendiidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0%	0%
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.150.000	105.075.342	98,98%	98%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.150.000	3.149.000	99,96%	100%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.999.060	99,99%	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.955.000	99,77%	95%
4	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	10.880.000	10.869.340	99,90%	95%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.120.000	3.120.000	100%	100%
6	Penyediaan Bahan/Material	9.000.000	7.998.942	88,87%	100%

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.984.000	99,96%	100%
05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.893.691.000	1.793.089.579	94,68%	95%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	64.164.079	91,66%	92%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.950.000	99,66%	100%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.795.691.000	1.712.975.500	95,39%	95%
06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.000.000	83.765.102	92,04%	92%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.000.000	46.096.102	90,38%	90%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	12.695.000	84,63%	85%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.974.000	99,89%	100%
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	81.500.000	80.283.200	98,50%	99%
01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	81.500.000	80.283.200	98,50%	99%
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	50.500.000	49.437.000	97,89%	98%
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	31.000.000	30.846.200	99,50%	100%
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	240.000.000	238.192.604	99,24%	99%
01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40.000.000	39.674.050	99,18%	99%
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	40.000.000	39.674.050	99,18%	99%
02	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	200.000.000	198.518.554	99,25%	99%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	200.000.000	198.518.554	99,25%	99%
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.294.500.000	3.229.312.149	98,02%	98%
01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.294.500.000	3.229.312.149	98,02%	98%
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.279.500.000	3.214.334.849	98,01%	98%
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	15.000.000	14.977.300	99,84%	100%
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	16.000.000	15.855.000	99,09%	99%
01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	16.000.000	15.855.000	99,09%	99%

1	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	16.000.000	15.855.000	99,09%	99%
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	38.500.000	37.441.500	97,25%	97%
01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.500.000	37.441.500	97,25%	97%
1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.500.000	37.441.500	97,25%	97%
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000	50.000.000	100%	100%
01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100%	100%
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	10.000.000	100%	100%
2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10.000.000	10.000.000	100%	100%
3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000	100%	100%
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.000.000	25.000.000	100%	100%
01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100%	100%
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000	100%	100%
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	9.441.644	94,41%	95%
01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000	9.441.644	94,41%	95%
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1.400.000	1.307.000	93,35%	93%
2	Koordinasi, Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	8.600.000	8.134.644	94,58%	95%
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.328.349.000	3.313.971.901	99,56%	100%
01	Pengelolaan Persampahan	3.328.349.000	3.313.971.901	99,56%	100%

1	Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	197.920.500	196.937.500	99,50%	100%
2	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPS/TPS/SPA Kabupaten/Kota	1.469.349.000	1.467.946.876	99,90%	100%
4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50.000.000	50.000.000	100%	100%
3	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.611.079.500	1.599.087.525	99,25%	99%
J U M L A H		17.134.220.000	16.772.137.835	97,88%	97,88%

Adapun langkah mendatang yang akan diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan capaian kinerja dengan langkah sebagai berikut :

1. Menjalankan kegiatan sesuai *schedule* yang telah ditetapkan sehingga target tercapai maksimal.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran maupun perluasan tutupan lahan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program melalui pemilahan kegiatan yang langsung menasar pada pencapaian target dan penyelesaian berbagai masalah di bidang Lingkungan Hidup

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengukuran terhadap kinerja organisasi yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber anggaran keuangan dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

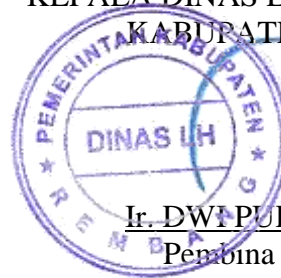
Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja yang telah dilakukan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil dengan kategori baik.

4.2 Rekomendasi

Adapun langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja adalah berusaha melaksanakan program / kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan / monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rembang, 17 Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG



Ir. DWT PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 199103 1 009

LAMPIRAN